

Strategi Pesantren dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Bimbingan Karir Santri

Hidayat Darussalam¹ | Gustin² | Edi Mulyono³

¹ UIN Fatmawati Sukarno

² IAIN SAS Bangka Belitung

³ UIN Fatmawati Sukarno

Korespondensi

Jl. Raya Petaling Km.13 Desa

Petaling Kec. Mendo Barat

Kab. Bangka

gustin@iainsasbabel.ac.id

Abstract

At present, the role of pesantren (Islamic boarding schools) in empowering the community's economy is considered suboptimal and still focused solely on educational activities. Even if there are business units in the pesantren, these units only serve as income sources for the pesantren itself. This type of research is the result of data collection from field research, processed qualitatively using a descriptive method. Data collection methods include interviews, observations, and documentation. The existing data will be analyzed systematically to make it easy to interpret and understand. The research results conclude that the strategy of pesantren in economic empowerment is to utilize the Pesantren Cooperative (Kopontren). Then, efforts for career guidance for students are conducted through four patterns: 1) career guidance through economic activities centered on the kyai (religious leader); 2) career guidance for students through pesantren economic activities; 3) career guidance for students through economic activities for students; 4) career guidance for students through economic activities for alumni.

KEYWORDS: guidance, career, pesantren, students.

Abstrak

Pada saat ini peran pesantren dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dinilai masih belum optimal dan masih terfokus kepada kegiatan pendidikan saja dan walaupun ada unit usaha pesantren unit usaha tersebut hanya sebagai income bagi pesantren itu sendiri. Jenis penelitian ini merupakan hasil pengumpulan data dari penelitian lapangan (field research) yang diolah secara kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data penelitian

menggunakan wawancara (interview), observasi dan dokumentasi. Data yang ada akan dianalisa secara sistemik agar mudah diinterpretasikan dan dimaknai. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa strategi pesantren dalam pemberdayaan ekonomi yaitu memanfaatkan Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren). Kemudian upaya bimbingan karir santri melalui empat pola yaitu 1) bimbingan karir melalui usaha ekonomi yang berpusat pada kyai; 2) bimbingan karir santri melalui usaha ekonomi pesantren; 3) bimbingan karir santri melalui usaha ekonomi untuk santri; 4) bimbingan karir santri melalui usaha ekonomi bagi para alumni santri.

KATA KUNCI: bimbingan, karir, pesantren, santri.

1 | Pendahuluan

Pesantren merupakan sistem pendidikan tertua saat ini jika dibandingkan dengan lembaga pendidikan yang pernah muncul di Indonesia dan sejak lama sudah dianggap sebagai produk budaya Indonesia yang *indigenous* (berkarakter khas). Perkembangan dan kelebihan pesantren erat kaitannya dengan sistem manajemen yang dikembangkan. Ada dua alasan mengapa pesantren dapat berperan sebagai pelopor perekonomian umat. Pertama, santri adalah golongan masyarakat yang berkomitmen tinggi dengan agamanya. Komitmen para santri dalam agamanya tersebut dapat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan para santri. Kedua, fokus kegiatan pesantren pada kajian-kajian keislaman dapat membuatnya menjadi agen perubahan dan penggerak ekonomi syariah di masyarakat sekaligus melahirkan entrepreneur muda yang berjiwa islami.

Optimalisasi dan strategi semua sumber daya yang dimiliki pesantren dapat tercipta sebuah kekuatan besar dalam perekonomian bila dikelola

dengan baik. Dari segi aset misalnya, pesantren bisa memanfaatkan luasnya tanah yang mereka miliki untuk digunakan dalam kegiatan bercocok tanam. Pekerja dari kegiatan bercocok tanam tersebut bisa saja para santri yang dilakukan secara bergantian atau bisa pula dengan memperkerjakan masyarakat di sekitar pesantren sebagai petani yang mengelola tanah tersebut. Hasil panen yang didapat bisa dijual untuk membiayai kegiatan operasional pesantren.

Selain itu, pesantren juga dapat memanfaatkan aset lain yang dimilikinya untuk ditujukan pada sektor perekonomian. Pemanfaatan aset ini harus dibarengi dengan manajemen aset yang baik dari pihak pesantren agar pemanfaatan aset dapat berlangsung secara optimal. Pemberdayaan ekonomi umat berbasis pesantren penting untuk dilakukan karena Indonesia yang saat ini masih dalam jajaran negara berkembang sedang gencar-gencarnya menumpas kemiskinan sehingga dibutuhkan sebuah cara yang efektif untuk mengurangi kemiskinan. Nilai-nilai ini juga tertuang dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun

2019 tentang Pesantren pada pasal 3 poin (c) bahwa pesantren diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat. [1]

Hadirnya pesantren di Kota Bengkulu kemudian mengiringi peran strategisnya yang dapat membawa kemajuan diwilayah sekelilingnya menjadi lebih berkembang. Pesantren sesungguhnya telah memainkan peran yang mencakup peran dalam bidang perekonomian, sosial dan politik.

Pada saat ini peran pesantren dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dinilai masih belum optimal dan masih terfokus kepada kegiatan pendidikan saja dan walaupun ada unit usaha pesantren unit usaha tersebut hanya sebagai income bagi pesantren itu sendiri. Dari latar belakang inilah kami tertarik untuk membahas langkah-langkah strategis yang mungkin dilakukan oleh pesantren dalam upaya memaksimalkan kekuatan yang ada pada pesantren untuk turut serta membantu

negara dalam pemberdayaan masyarakat di sekitar pesantren.

Kemampuan pesantren untuk tetap bertahan dan bahkan eksistensi pendidikannya diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional tidak terlepas dari sistem manajemen pendidikan yang dikembangkan selama ini. Menurut Mastuhu, suatu sistem pendidikan (termasuk pondok pesantren) akan menentukan apakah lembaga pendidikan yang bersangkutan akan diminati atau tidak oleh khalayak. Suatu sistem pendidikan dikatakan mampu melayani tantangan zamannya apabila ia mampu merespons kebutuhan anak didik dan mengembangkan kemampuannya sesuai dengan kecenderungannya, merespons kemajuan ilmu dan teknologi, serta kebutuhan pembangunan nasional. Di samping itu, sistem pendidikan juga akan diminati oleh khalayak apabila ia mampu memberikan pedoman moral atau budi pekerti luhur sesuai dengan keyakinannya, mengembangkan keterampilan atau keahlian sehingga mereka mampu hidup hormat dan disegani dalam tata pergaulan bersama di masyarakat, mendatangkan manfaat, rasa aman, dan

kepercayaan, serta harapan bagi masyarakatnya untuk mamajukan kehidupan bersama lahiriah-batiniah.

Secara umum, bila memperhatikan seluk beluk keberadaan Pesantren Darussalam, maka dapat ditemukan beberapa keunggulan dan keunikan di dalamnya, antara lain: (1) pengelolaan Pondok lebih mengedepankan aspek-aspek kekeluargaan, di mana tenaga pendidik dan kependidikannya berasal dari kalangan internal keluarga, dan warga masyarakat sekitar pondok, serta memprioritaskan para alumni yang memiliki kompetensi; (2) menyelenggarakan pembelajaran yang lebih mendalam mengenai kajian kitab kuning dan juga di tambah bekal ilmu gramatikal bahasa Arab (ilmu nahwu) dan bahkan menjadikannya sebagai ciri khas Pondok Pesantren Darussalam; (3) aspek kurikulum lebih menekankan pemberian materi agama, terutama nahwu sebagai bentuk konsep Kurikulum Tingkat Satuan Pembelajaran (KTSP) pondok; (4) dari aspek sosial masyarakat, Pondok Pesantren Darussalam tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat yang notabene bekerja sebagai petani.

Pemberdayaan terdiri dari dua kata, yakni pemberdayaan dan umat. Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia memiliki kata dasar daya yang berarti kekuatan. Kata pemberdayaan memiliki makna usaha pemberian daya, memberikan kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak.[2]

Pemberdayaan juga berasal dari kata *power* dalam bahasa Inggris. Kata *power* bermakna kekuasaan atau keberdayaan. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan yang selalu hadir dalam konteks hubungan sosial antarmanusia. Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan adalah sebuah kegiatan untuk memperkuat keadaan kelompok yang lemah dalam masyarakat, termasuk golongan masyarakat miskin. Sedangkan sebagai tujuan pemberdayaan adalah hasil dari suatu perubahan sosial dimana masyarakat memiliki daya, kekuasaan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dirinya dalam aspek apapun serta mampu menyampaikan aspirasi, memiliki pekerjaan, mampu berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan

mandiri dalam melaksanakan segala kewajiban hidupnya.[3]

Dalam melakukan pemberdayaan ekonomi, pesantren dapat melakukan pemberdayaan dengan sistem dakwah. Pemberdayaan dengan sistem dakwah ini akan membuat para santri lebih terbiasa untuk berdakwah sehingga tercipta output (lulusan) pesantren yang ahli dalam bidang agama dan dakwah. Gerakan dakwah pemberdayaan ini adalah sebuah strategi dakwah menuju transformasi sosial, dimana stigma buruk tentang dakwah seperti pemaksaan, eksploitasi, penindasan dan sebagainya tidak terjadi saat kegiatan dakwah berlangsung. Pemberdayaan dakwah ini lebih mengutamakan aksi dibanding wacana atau retorika (*tabligh*). Selain itu, dakwah pemberdayaan ini biasanya dilakukan oleh lembaga yang independen dan tidak memiliki keterikatan dalam mencapai tujuan dengan lembaga lain. Hal ini menjadikan pesantren sebagai lembaga yang tepat untuk melaksanakan pemberdayaan dakwah ini.

Ada beberapa hal yang bisa dilakukan pesantren untuk memberdayakan perekonomian

pesantren, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Lapangan pekerjaan,
- b. Peluang usaha serta pendirian badan usaha,
- c. Lembaga keuangan dan/atau lembaga sosial pesantren
- d. Edukasi santri.

2 | Metode

Jenis penelitian ini merupakan hasil pengumpulan data dari penelitian lapangan (field research) yang diolah secara kualitatif dengan metode deskriptif. Objek yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah strategi pemberdayaan ekonomi pesantren. Berikutnya peneliti akan terlibat secara aktif dalam setiap tahapan atau prosedur penelitian yang dilalui. Dalam pengumpulan data akan secara langsung bertatap muka dengan sumber utama/informan, dalam analisa data juga akan melibatkan para ahli dan pakar dalam pengolahannya, sehingga kapasitas peneliti dalam hal ini sangatlah menentukan.

Berikut kami uraikan alasan akademik mengapa menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu: karena

penelitian tentang Strategi Pesantren dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Bimbingan Karir Santri dideskripsikan secara naratif sesuai dengan data yang dikumpulkan di lapangan atau lokasi penelitian. Selain itu penelitian kualitatif ini digunakan untuk mendalami landasan normatif-teoritis sebagai bahan atau materi naratif yang peneliti sampaikan. Penelitian ini ingin menampilkan fakta, dinamika dan realita tentang pemahaman Strategi Pesantren dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Bimbingan Karir Santri. Fokus kajian penelitian ini sifatnya dinamis dan fleksibel. Oleh karena itu, penelitian terhadap Strategi Pesantren dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Bimbingan Karir Santri dimungkinkan dengan prosedur kualitatif.

Data primer yang didapati secara langsung dari pihak pertama atau informan penelitian. Adapun kriteria data primer ini terkait tentang wilayah penelitian, kapasitas dan kredibilitas informan dalam memberikan informasi terkait dengan fokus kajian dan batasan penelitian. Dari pemahaman ini, data penelitian dihasilkan dari sumber data

utama yang secara langsung dikumpulkan oleh peneliti.

Dalam penelitian tentang pesantren dan pemberdayaan masyarakat telah menetapkan tehnik penentuan informan dengan menggunakan metode *purposeful sampling*, yaitu menentukan informan berdasarkan ciri-ciri dan atau pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Berdasarkan pertimbangan diatas, informan dalam penelitian ini adalah kyai, pengurus pondok, santri dan wali santri.

Selanjutnya dalam pengumpulan data penelitian menggunakan wawancara (interview), observasi dan dokumentasi. Data yang ada akan dianalisa secara sistemik agar mudah diinterpretasikan dan dimaknai.[4] Berpijak pada jenis penelitian yang digunakan yakni kualitatif, bukan kuantitatif. Maka analisa data lebih berorientasi pada yang tersurat bukan yang tersirat, yang bersifat induktif bukan general.[5] Adapun tahap dalam analisa data dalam penelitian ini yaitu: *Pertama*, seleksi data. Yaitu mereduksi serta mengidentifikasi data yang

kemudian di beri kode sesuai variable penelitian yang berkaitan dengan literasi media bagi dengan membuat kategorisasi. *Kedua*, display data. yaitu upaya menampilkan data penelitian yang didapati, dikategorisasi dan diklasifikasi. Data yang sudah diseleksi tersebut kemudian dilakukan uji secara teoritis. *Ketiga*, verifikasi data. tahap ini dilakukan untuk menetapkan hasil akhir dari rangkaian verifikasi dalam bentuk *statemen* dan *stretching*.

3 | Pemberdayaan Dalam Konsep Al Quran

Secara umum ada dua prinsip yang ditawarkan Alquran dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, yaitu prinsip *ta'awun* dan prinsip *syura*[6]. Prinsip *ta'awun* adalah prinsip kerja sama dan sinergi diantara berbagai pihak. Pihak-pihak tersebut antara lain pihak pesantren, masyarakat dan lembaga pemerintah setempat. Ketiga pihak ini harus bekerjasama sama secara harmonis agar dapat pemberdayaan perekonomian umat secara utuh dan menyeluruh. Pesantren bisa membuat program-program dalam memberdayakan perekonomian masyarakat. Masyarakat

dapat berpartisipasi dalam program yang dibuat pesantren tersebut. Sedangkan pemerintah dapat memantau dan mendukung program yang dibuat oleh pesantren tersebut. Prinsip *syura* bermakna musyawarah antara pemerintah dengan lembaga yang terkait dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat ini. Pemerintah bisa melakukan musyawarah dengan pesantren tentang program yang dibuat oleh pesantren. Pemerintah juga dapat bertindak sebagai fasilitator dan regulator dalam program pemberdayaan ini sesuai dengan hasil musyawarah yang disepakati.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang atau kelompok, khususnya kelompok yang rentan dan lemah sehingga memiliki kekuatan atau kemampuan untuk: (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga memiliki kebebasan (*freedom*); (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan kelompok lemah/rentan untuk meningkatkan pendapatannya, dan memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan; dan (c) berpartisipasi dalam pembangunan dan proses pengambilan

keputusan-keputusan yang mempengaruhi kelompok lemah/rentan.

Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan pihak-pihak yang lemah atau kurang beruntung. Pemberdayaan adalah sebuah proses yang dengannya suatu pihak akan menjadi kuat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam memperbaiki keadaan. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur ekonomi yang ada di tengah masyarakat. Pemberdayaan adalah suatu cara agar masyarakat, organisasi, dan komunitas mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya.

Dalam menumbuhkan eksistensi dalam suatu pemberdayaan diperlukan suatu eksistensial humanistik. Dimensi ini merupakan landasan dasar yang dapat digunakan dalam suatu pemberdayaan bagi individu maupun kelompok yang meliputi adanya kesadaran langsung dari pribadi dalam melaksanakan suatu kegiatan pemberdayaan, adanya rasa bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan, adanya hubungan yang harmonis antara semua pihak yang terkait suatu pemberdayaan

tersebut, memiliki konsep, struktur, strategi dalam mencapai, memahami bahwa tantangan dalam pemberdayaan dapat diselesaikan secara solutif, dan melalui bimbingan yang sesuai dengan kaidah-kaidah islam merupakan upaya yang dilakukan saat pemberdayaan melaksanakan proses atau program.[7]

Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi adalah proses sekaligus tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan ekonomi adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah (kondisi ekonominya) dalam masyarakat. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai, dan konsep mengenai tujuan pemberdayaan ini seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses. Bila konsep pemberdayaan di atas dilekatkan mendahului konsep ekonomi, maka didapati konsep baru yang lebih sempit dan spesifik. Pemberdayaan ekonomi merupakan kegiatan memberi kekuasaan pada pihak ke-dua (sasaran pemberdayaan) agar menjadi mampu dalam bidang ekonomi. Konsep pemberdayaan ekonomi lahir sebagai

antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada masyarakat mayoritas (yang bukan pemegang kekuasaan ekonomi). [8]

Konsep ini dibangun dari kerangka logika sebagai berikut:

- a. Bahwa pemusatan kekuasaan terbangun dari pusat penguatan faktor produksi;
- b. Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat penguasa pinggiran;
- c. Kekuasaan akan menghasilkan bangunan atas sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan legitimasi;
- d. Kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu: masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya.

Melalui kerangka konsep yang dibangun ini dapat menjadi landasar dalam memberikan deskripsi yang tepat dalam menganalisis Strategi Pesantren dalam Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat dan Bimbingan Karir Santri.

4 | Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Ekonomi di Pesantren dan Bimbingan Karir Santri

1. Doktrin Keagamaan

Agama merupakan petunjuk bagi manusia, baik di dalam masalah keduniaan maupun masalah ibadah dengan Tuhan. Dalam segi muamalah (hubungan keduniawian) agama-agama samawi telah mengatur umatnya, baik yang berhubungan antar manusia dalam bidang pemerintahan, hukum, kemasyarakatan, maupun persoalan-persoalan yang berhubungan dengan ekonomi. Pada bidang ekonomi, para ilmuwan telah mengadakan suatu penelitian secara mendalam hubungan agama dan ekonomi, yang salah satu pokok penelitiannya adalah, adakah kontribusi agama terhadap semangat ekonomi pada masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh Kenneth Boulding, di dalam penelitiannya tentang pengaruh agama Kristen protestan terhadap semangat ekonomi, ia menemukan bahwa pengaruh agama protestan ternyata mempunyai dampak terhadap

kehidupan ekonomi dan sejarah, bahkan lebih besar daripada pengaruh agama terhadap pemikiran ekonomi saja.[9]

Agama turut mempengaruhi pengambilan keputusan mengenai jenis komoditi yang diproduksi, terbentuknya kelembagaan ekonomi dan tentu juga praktek-praktek atau perilaku ekonomi. Pendapat di atas diperkuat oleh Tesis Max Weber yang membuktikan bahwa agama, dalam hal ini etik protestanisme, turut memberi saham terhadap perkembangan kapitalisme dan revolusi industri. Gambaran di atas menunjukkan bahwa nilai-nilai etika agama mempunyai peranan yang kuat untuk menggerakkan semangat ekonomi seperti yang digambarkan Weber dalam bukunya *The Protestant Ethic and the spirit of capitalism*. Sekarang bagaimanakah dengan Islam. Di dalam Islam sebenarnya masalah perekonomian – yang masuk kategori urusan keduniaan (muamalah) - mempunyai bobot yang besar dalam agama, tidak hanya sekedar suplemen sebagaimana anggapan umum selama ini. Islam mengajarkan keseimbangan antara orientasi kehidupan dunia dan akhirat.

Walau demikian, Islam yang mengajarkan etika kehidupan agar di dalam memperoleh harta tetap menjaga perbuatan kebaikan terhadap orang atau menjaga hak-hak asasi orang lain; tidak serakah, tidak dengan merampas hak orang lain, tidak zalim, dan tidak merugikan orang lain. Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis yang memberikan kebebasan serta hak kepemilikan kepada individu dan menggalakkan usaha secara perseorangan. Tidak pula dari sudut pandang komunis, yang ingin menghapuskan semua hak individu dan menjadikan mereka seperti budak ekonomi yang dikendalikan oleh negara.

Tetapi Islam membenarkan sikap mementingkan diri sendiri tanpa membiarkannya merusak masyarakat. Untuk meningkatkan perekonomian Islam memberikan motivasi pada pemeluknya untuk bekerja keras dan mempunyai etos kerja yang tinggi.[10] Karena Islam pada hakekatnya adalah agama yang mengajarkan dan menganjurkan umatnya untuk meraih kekayaan hidup baik secara material maupun spiritual. Anjuran tersebut paling tidak tercermin dalam dua dari lima rukun

Islam yaitu zakat dan haji. Kedua pelaksanaan rukun Islam ini mensyaratkan adanya kekayaan atau kecukupan yang bersifat material. Jika pelaksanaan zakat dan ibadah haji memerlukan kecukupan material itu, lantas mencari materi menjadi wajib hukumnya. Dengan kata lain, rukun Islam mewajibkan umatnya untuk berkecukupan secara material. Nabi sendiri juga menegaskan bahwa al-yad al-ulya khairun min al-yad as-sufla, “tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah”, atau memberi lebih baik daripada meminta.

Al-Qur’an juga yang menjelaskan untuk bekerja keras dan mengajarkan pentingnya umat Islam untuk bekerja dan memikirkan ekonominya. Di antaranya QS. Al-Qashash [28]: 77: “Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu [kebahagiaan] negeri akhirat; dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari [kenikmatan] duniawi. Buat baiklah [kepada orang lain] sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi”. Dalam tafsir al-Jalalayn, ayat tersebut ditafsirkan; “Perolehlah [untuk] kepentingan akhirat

[harta kekayaan] yang telah Allah berikan kepadamu, dengan cara menginfakkan [sebagian] harta tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Dan jangan kamu lupakan bagian kamu yang berkaitan dengan keduniaan untuk menjadi amal akhirat”²¹ Juga dalam QS. Al-Jumu’ah [62]: 10: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu sekalian di muka bumi dan carilah karunia Allah (yakni rizqi/harta) dan ingatlah kepada Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”. Islam mendorong orang untuk bekerja. Hadits yang berbunyi: “Asyaddu an-nas „adzabun yauma al-qiyamah al-maghfiy al-bathil (siksaan paling berat pada hari kiamat, adalah bagi orang yang hanya mau dicukupi orang lain dan hidup menganggur)”.^[11]

Menurut Yusuf Qardhawi, Islam tidak menginginkan umatnya berada dalam kemiskinan. Karena akibat kemiskinan dan ketimpangan sosial bisa menyebabkan munculnya penyimpangan akidah. Pendapat ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW : “Kemiskinan dapat mengakibatkan kekafiran” (HR. Abu Na’im dari Anas). Kemiskinan juga bisa menyebabkan orang tergelincir dalam akhlak dan moralitas yang tercela. Karena

suara perut dapat mengalahkan suara nurani. Lilitan kesengsaraan pun bisa mengakibatkan seseorang meragukan nilai-nilai akhlak dan agama. Manusia sebagai subyek ekonomi, yang dalam kelompok besar disebut umat, oleh Islam dibebani (mukallaf) untuk berikhtiar sesuai dengan kadar potensinya. Taklif (pembebanan) ini berimplikasi pada banyak hal. Dalam disiplin fiqih – meskipun ekonomi sendiri bukan merupakan komponen fiqih- ikhtiar dalam arti luas disinggung karena erat kaitannya dengan usaha ekonomi. Kita mengenal pasal-pasal muamalah sebagai modifikasi perekonomian secara lengkap dan terinci. Berpangkal dari keberadaan manusia sebagai obyek ekonomi (produsen dan juga konsumen) maka kecuali upaya pembenahan sistem ekonomi, seperti peningkatan partisipasi modal swasta, hal yang tak kalah pentingnya adalah menggarap ketrampilan dan daya kemampuan pelaku ekonomi, yang berkaitan dengan usaha atau ikhtiar manusia.[12]

Menyinggung perihal ikhtiar dalam perekonomian, kita ingat sebuah hadits yang kurang lebih artinya, “Bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi

adalah wajib (fardhu) setelah kewajiban yang lain.” Interpretasi hadits ini akan melahirkan kelompok-kelompok manusia produktif atau manusia yang bersumber daya tinggi yang sekaligus merupakan inti perekonomian. Barangkali dari kenyataan bahwa Allah tidak memberi rizqi dalam bentuk jadi dan siap digunakan, melainkan hanya dipersiapkan sebagai sarana dan sumber daya alam, maka sudah barang tentu untuk mengolahnya, mengikhtiar dalam bentuk industri, dan lain-lain. Dari hadits ini, kita bisa menemukan pandangan yang proporsional terhadap ekonomi. Sikap ikhtiar dapat menghindarkan manusia dari sikap fatalistik (berserah pada nasib) yang secara tegas telah dilarang oleh Allah dalam surat Yusuf ayat 87: “Janganlah kamu sekalian terputus asa atas rahmat Allah. Tiada yang berputus asa kecuali orang-orang kafir”.

2. Bimbingan Karir Santri dan Pemberdayaan Ekonomi

Konsep tentang peran santri dalam pemberdayaan ekonomi sangat menarik dibahas, karena santri yang setiap harinya disibukkan dengan berbagai aktivitas belajar atau mengaji, ternyata juga memiliki aktivitas ekonomi.

Pada pesantren tertentu, santri memang dibekali dengan berbagai ketrampilan / keahlian di bidang ekonomi seperti koperasi, kerajinan dan berdagang. Semua itu dilakukan oleh pihak pesantren sebagai upaya untuk membekali para santri dengan berbagai *skill* keahlian atau setidaknya menyiapkan mental dan ketrampilan para santri supaya kelak ketika keluar dari pesantren sudah bisa mandiri. Oleh karena itu wajar jika pesantren berusaha mengembangkan diri dengan melakukan suatu tindakan nyata (*dakwah bil hal*) pada masyarakat di sekitar pesantren di segala bidang, termasuk di dalamnya pemberdayaan ekonomi.

Untuk melangkah pada Program pembangunan yang berbasis pemberdayaan ekonomi, paling tidak pesantren harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) kegiatan yang dilaksanakan harus terarah dan menguntungkan pesantren dan masyarakat sekitar terutama masyarakat yang lemah, (b) pelaksanaannya dilakukan oleh pesantren dan masyarakat sendiri, (c) karena pesantren dan masyarakat yang lemah sulit untuk bekerja sendiri-sendiri akibat kurang

berdaya, maka upaya pemberdayaan ekonomi pesantren menyangkut pula pengembangan kegiatan usaha bersama (*cooperatif*) dalam kelompok yang spesifik terkait dengan unit-unit usaha yang bisa diberdayakan kaum santri, (d) menggerakkan partisipasi masyarakat sekitar untuk saling membantu dalam rangka kesetiakawanan sosial. Dalam hal ini termasuk keikutsertaan orang-orang setempat yang telah maju.[13]

Setidaknya ada empat macam kemungkinan pola usaha ekonomi di lingkungan pesantren; *Pertama*, usaha ekonomi yang berpusat pada kyai sebagai orang yang paling bertanggungjawab dalam mengembangkan pesantren. Misalnya seorang kyai mempunyai perkebunan cengkih yang luas. Untuk pemeliharaan dan pemanenan, kyai melibatkan santri-santrinya untuk mengerjakannya. Maka terjadilah hubungan mutualisme saling menguntungkan: kyai dapat memproduksi perkebunannya, santri mempunyai pendapat tambahan, dan ujungnya dengan keuntungan yang dihasilkan dari perkebunan cengkeh maka kyai dapat menghidupi kebutuhan pengembangan pesantrennya.

Kedua, usaha ekonomi pesantren untuk memperkuat biaya operasional pesantren. Contohnya, pesantren memiliki unit usaha produktif seperti menyewakan gedung pertemuan, rumah dsb. Dari keuntungan usaha-usaha produktif ini pesantren mampu membiayai dirinya, sehingga seluruh biaya operasional pesantren dapat ditalangi oleh usaha ekonomi ini. Seperti pesantren Sidogiri yang mempunyai beberapa usaha seperti swalayan, toko-toko kelontong yang hasilnya untuk pembiayaan pesantren.

Ketiga, usaha ekonomi untuk santri dengan memberi ketrampilan dan kemampuan bagi santri agar kelak ketrampilan itu dapat dimanfaatkan selepas keluar dari pesantren. Pesantren membuat program pendidikan sedemikian rupa yang berkaitan dengan usaha ekonomi seperti pertanian dan peternakan. Tujuannya semata-mata untuk membekali santri agar mempunyai ketrampilan tambahan, dengan harapan menjadi bekal dan alat untuk mencari pendapatan hidup. Pesantren Baitul Hamdi di Menes Pandeglang dapat dijadikan sampel pesantren dalam jenis ini juga, karena disana santri diajak untuk

bertani, dan berkebun. *Keempat*, usaha ekonomi bagi para alumni santri. Pengurus pesantren dengan melibatkan para alumni santri menggalang sebuah usaha tertentu dengan tujuan untuk menggagas suatu usaha produktif bagi individu alumni, syukur bagi nanti keuntungan selebihnya dapat digunakan untuk mengembangkan pesantren. Prioritas utama tetap untuk pemberdayaan para alumni santri. Hal ini seperti yang dilakukan oleh pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur dan pesantren Maslakul Huda di Kajen Pati Jawa Tengah.[14]

Berdasarkan hal tersebut dikembangkan beberapa pendekatan yang memungkinkan bisa diterapkan dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi, yaitu (1) upaya pemberdayaan ekonomi pesantren harus terarah kepada pesantren yang benar-benar membutuhkan dan masyarakat di sekitarnya banyak yang miskin atau lemah, (2) pendekatan kelompok unit usaha untuk memudahkan pemecahan masalah yang dihadapi bersama-sama, (3) pendampingan kepada mereka selama proses pemberdayaan yang

dilakukan dengan pembentukan kelompok.[15]

5 | Strategi Pemberdayaan Ekonomi Pondok Di Pesantren Darussalam

Pendapatan Pondok Pesanten tentunya selain menggali sumber pendanaan dari masyarakat, pondok juga dapat melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi produktif untuk menambah sumber pendanaan pondok. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren). Kehadiran Kopontren di pondok diharapkan dapat menjadi cikal bakal program-program perimbangan biaya yang tentunya harus dikelola secara professional dan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

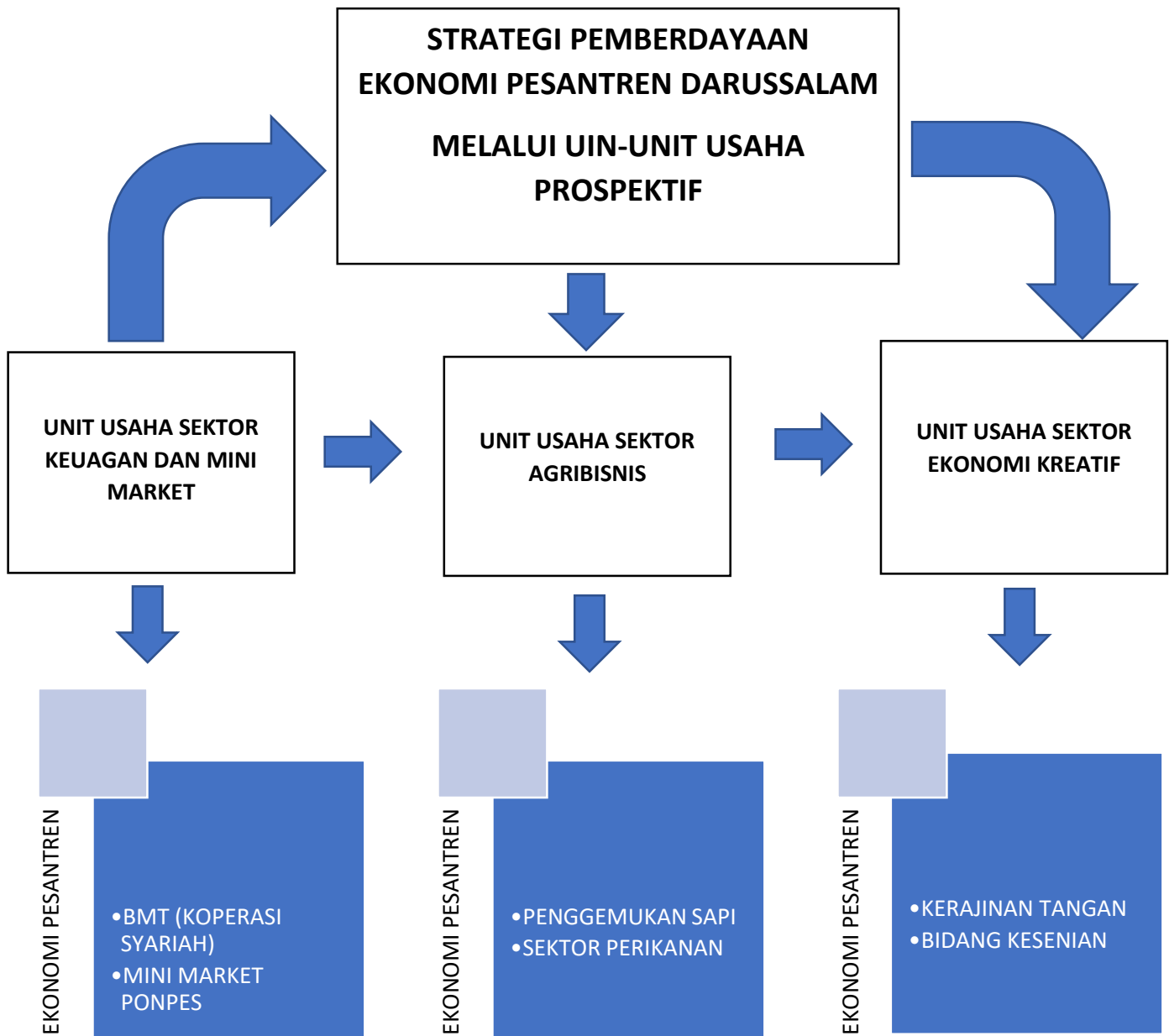
Pelaksanaan pemberdayaan ekonomi di Pondok Pesantren Darussalam tergolong unik, terkesan sederhana dan belum maksimal sehingga dibutuhkan adanya suatu terobosan baru untuk membuka “kran” sumber-sumber pendapatan pondok. Tentu saja dengan satu tujuan utama bahwa keberlangsungan keberadaan pondok pesantren harus memiliki unit-unit usaha

mandiri yang mana nanti diharapkan dengan keberadaan unit usaha tadi dapat menunjang perekonomian pondok pesantren Darussalam.

Secara umum dan bertahap ada beberapa perencanaan yang akan dilakukan Pondok Pesantren Darussalam dalam memaksimalkan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam upaya merangsang pembentukan unit unit usaha yang potensial sebagai sumber penghasilan tetap Pondok Pesantren dimasa yang akan datang.

Unit-unit usaha ini dapat diklasifikasikan diberbagai sektor yang didukung oleh Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) Pondok Pesantren Darussalam yang dilaksanakan dengan kolaborasi antara pihak yayasan dengan seluruh elemen pondok, mulai dari para ustadz, pengasuh, santri, wali santri dan juga memasukkan masyarakat sekitar. Strategi ini dapat dilihat dari alur skema berikut.

SKEMA
STRATEGI PESANTREN DALAM PEMBERDAYAAN
EKONOMI MASYARAKAT DAN BIMBINGAN KARIR SANTRI
DI PESANTREN DARUSSALAM



6 | Penutup

Strategi Pesantren dalam pemberdayaan ekonomi yaitu memanfaatkan Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren). Kehadiran Kopontren di pondok diharapkan dapat menjadi cikal bakal program-program perimbangan biaya yang tentunya harus dikelola secara professional dan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian upaya bimbingan karir santri melalui empat pola yaitu 1) bimbingan karir melalui usaha ekonomi yang berpusat pada kyai sebagai orang yang paling bertanggungjawab dalam mengembangkan pesantren. Untuk pemeliharaan dan pemanenan, kyai melibatkan santri-santrinya untuk mengerjakannya. Maka terjadilah hubungan mutualisme saling menguntungkan; 2) bimbingan karir santri melalui usaha ekonomi pesantren untuk memperkuat biaya operasional pesantren; 3) bimbingan karir santri melalui usaha ekonomi untuk santri dengan memberi ketrampilan dan kemampuan bagi santri agar kelak ketrampilan itu dapat dimanfaatkan selepas keluar dari pesantren. Pesantren membuat program pendidikan

sedemikian rupa yang berkaitan dengan usaha ekonomi seperti pertanian dan peternakan; 4) bimbingan karir santri melalui usaha ekonomi bagi para alumni santri. Pengurus pesantren dengan melibatkan para alumni santri menggalang sebuah usaha tertentu dengan tujuan untuk menggagas suatu usaha produktif bagi individu alumni.

Daftar Pustaka

- [1] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019.
- [2] Asep Sugandi, Hasan Basri Tanjung, Radif Khotamir Rusli, Peran Pondok Pesantren (Ponpes) Modern Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Tabdir Muwahhid*, 2017. 1 (2). hlm. 99
- [3] Cucu Nurjamilah, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid dalam Perspektif Dakwah Nabi saw. *Journal Of Islamic Studies And Humanities*, 2016, 1 (1), hlm. 93.
- [4] Dadang Khamad, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hal. 102.

- [5] Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 2014, hal.15. Indonesia. Jakarta: Dharma Bhakti, hlm. 19.
- [6] Muhammad Istan . Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam. Al Falah: Journal of Islamic Economics, 2017, 2(1).
- [7] Masyhud, Sulthon. 2005. Manajemen Pondok Pesantren. Jakarta: Diva Pustaka, hlm. 20.
- [8] Prajono, O.S dan Pranarka, A.M.W.. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi, Jakarta: Penerbit CSIS. 1996, hlm. 41.
- [9] Azra, A. 1999. Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, hlm. 31.
- [10] Wahid, Abdurrahman. 1999. Bunga Rampai Pesantren. Jakarta: Dharma Bhakti, hlm.34.
- [11] Mastuhu. 1994. Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren. Jakarta: INIS, hlm. 28.
- [12] Saridjo, Marwan. dkk. 1979. Sejarah Pondok Pesantren di
- [13] Syatria Adymas Pranajaya, Eksistensial Humanistik Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam, Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Vol. 3, No. 1, 2020, 27 – 41.